



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ASET PUBLIK DI DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN)

Wahyu Widodo¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: wahyu.widodo@binabangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset public di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Banten telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Hal ini tercermin dari ketersediaan informasi publik yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang detail, serta adanya program khusus yang fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan aset publik.

Kata kunci: *Pengelolaan Aset Publik, Transparansi, Akuntabilitas*

Abstract

This study aims to analyze government policies in the management of public assets at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Banten Province. This study uses a qualitative approach with a case study design. The results of the study show that Bapenda Banten has shown a strong commitment to transparency and accountability in the management of public assets. This is reflected in the availability of easily accessible public information, detailed accountability reports, and special programs that focus on increasing transparency and accountability. However, there are still several challenges that need to be overcome to improve the quality of public asset management. This research provides recommendations to strengthen information systems, increase the capacity of human resources, and increase public participation in the supervision of public asset management.

Keywords: *Public Asset Management, Transparency, Accountability*

PENDAHULUAN

Dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola, mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan menggunakannya secara baik. Menurut (Dja'wa, 2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan tata kelola yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan – peraturan yang digunakan sebagai target dalam mengelola aset. Dalam mengelola aset, perlunya sumber daya yang kompeten, mengkoordinasikan antarbagian dalam pengelolaan aset, serta perlunya tingkat kesadaran tinggi pegawai terhadap Barang Milik Negara (Harfianah & Faisal, 2023).

Manajemen aset yang baik diperlukan adanya pemantauan, menghitung dan memahami kondisi aset. Karena, hal tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dalam mencapai hasil yang maksimal (Rahmadani et al., 2024). Reformasi di Indonesia mengakibatkan munculnya demokratis, akuntabilitas dan transparansi pada sektor pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor publik, yang berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang tata kelolanya baik. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban terhadap transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Rusrina, 2021).

Dalam memaksimalkan asas transparansi, kepala daerah wajib untuk memberikan informasi substansi anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada Peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Nurritziana et al., 2017). Transparansi memiliki pertanggungjawaban yang berfokus pada keterbukaan informasi yang relevan berkaitan dengan keuangan. Masyarakat dapat menilai mengenai kinerja pemerintah, jika hal tersebut diimplementasikan dengan transparansi yang baik (Adyaksana & Alqurani, 2020).

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berfokus terhadap tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menjelaskan, memberikan justifikasi atas tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, lembaga pengawas dan pemangku kepentingan lainnya (Rosidah et al., 2023).

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, maka transparansi dan akuntabilitas adalah suatu prinsip yang memiliki keterbukaan. Sehingga, untuk memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi terkait pengelolaan pada keuangan daerah serta suatu bentuk dari tanggung jawab atas sumber daya yang dimiliki (Sari et al., 2020).

Berdasarkan informasi dari situs internet, KPK mengagendakan pertemuan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memaksimalkan potensi PAD mereka. Tetapi dalam pertemuan itu, terdapat beberapa perwakilan dari berbagai daerah mengeluh terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikelola oleh DISPENDA Banten. Keluhan tersebut, karena dalam beberapa kurun waktu akhir akhir ini provinsi mengirimkan dana bagi hasil dengan melalui rekening tanpa tahu beberapa rincian mengenai jumlah data pengguna listrik. Maka dengan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset publik di Bapenda Provinsi Banten.

Beberapa konsep dan teori dasar terkait penelitian ini, diantaranya: Pengelolaan Aset Publik (Public Asset Management). Menurut (Lismaini Agustin, 2022) pengelolaan berasal dari kata manajemen secara etimologi, yang berarti melaksanakan, mengelola, mengatur. Menurut (Kinanti Putri Bestari, 2022) Terdapat berbagai jenis mengenai pengelolaan aset, seperti: tanah, gedung, bangunan, kendaraan, pemodalan jangka panjang dan lainnya. Transparansi (Transparency), Menurut (Yunnita, Christina Garung, 2020) mengemukakan bahwa transparansi memiliki kebebasan bagi setiap orang atau individu, untuk mendapatkan informasi dalam pemerintahan mengenai kebijakan dan proses perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai.

Menurut (Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, 2021) Transparansi memiliki arti yang sangat jelas, nyata dan memiliki sifat terbuka. Transparansi juga memiliki arti kejelasan mengenai keterbukaan informasi. Informatif, keterbukaan dan informasi yang lengkap merupakan bagian dari beberapa karakteristik transparansi (Dedy Afrianto, Sunardi, 2024). Menurut (Nur Azizah, Sahlan Hasbi, 2021) menyebutkan transparansi merupakan kontrol pada keterbukaan bagi suatu kelembagaan maupun suatu perusahaan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal.

Menurut (Fierda Shaftratunnisa, 2015) pada penelitiannya mengungkapkan terdapat beberapa indikator transparansi, yaitu: Terdapat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, Terdapat perencanaan dan pelaksanaan yang memiliki akses dalam informasi dan keterbukaan yang jelas, Terdapat pertanggungjawaban yang memiliki akses terhadap informasi dan keterbukaan yang jelas.

Akuntabilitas (Accountability), Akutabilitas yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaannya dalam kebijakan yang mempercayakan entitas untuk memperoleh target yang sebelumnya telah ditentukan (Khasanah & Marisan, 2022) Menurut (Dinata et al., 2023) Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi setiap individu yang dipercaya untuk mengelola sumber daya dengan memiliki jawaban yang terpaut pada pertanggungjawabannya.

Menurut (Arini Kurniawati & Dadang Sadeli, 2021) mengungkapkan akuntabilitas yaitu suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya terhadap capaian target dan sasaran yang ditentukan. Schedler dan Plano dalam (Reki, 2023) terdapat lima jenis akuntabilitas: Dana publik yang dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas fisik, Mematuhi hukum yang dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas legal, Menjalankan suatu program yang

dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas program, Melaksanakan prosedur yang dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas proses dan Hasil yang dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas outcome. Menurut (Irfansyah et al., 2023) menyebutkan terdapat beberapa Indikator akuntabilitas dalam dimensi akuntabilitas publik, yaitu: Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Manajerial dan Program.

METODE

Penelitian ini yaitu melalui penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman terhadap peneliti secara mendalam terhadap pengalaman. Lokasi dan subjek penelitian ini dilakukan di Bapenda Provinsi Banten. Subjek penelitian mencakup pegawai/staff yang terlibat dalam pengelolaan aset, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait pengelolaan aset publik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melalui wawancara, melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pegawai untuk menggali informasi lebih dalam tentang proses pengelolaan aset publik.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini secara tegas memperlihatkan bahwasannya transparansi merupakan pilar fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik di tingkat pemerintah daerah. Hampir seluruh responden menyatakan persetujuan yang kuat terhadap pentingnya transparansi ini. Implementasi transparansi di Kantor Bapenda Banten terlihat jelas melalui ketersediaan informasi publik yang luas dan mudah diakses. Situs web resmi Bapenda, menjadi portal utama bagi masyarakat untuk memperoleh data-data terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, Bapenda Banten telah berhasil memenuhi salah satu indikator penting transparansi, yaitu aksesibilitas yang tinggi terhadap dokumen publik. Adanya platform digital ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan publik/daerah.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik juga ditegaskan dalam hasil penelitian ini. Sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam praktik Kantor Bapenda Banten yang secara rutin mempublikasikan laporan pertanggungjawaban, seperti Rincian Laporan Belanja Daerah, di situs web resminya. Selain itu, keberhasilan Kantor Bapenda dalam

mencapai target pada kualitas kerja dan kegiatan, diantaranya seperti meningkatkan dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi terhadap kinerja, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas.

Adanya program khusus yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset pada keuangan sektor publik merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan Bapenda untuk menciptakan tata kelola yang optimal.

Pada hasil penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya program terkait pelayanan pajak daerah tahun anggaran 2019 menargetkan dalam pencapaian dan indikator kinerja suatu program dalam meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor public yang dicadangkan oleh Kantor Bapenda Banten. Program ini secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam seluruh aspek pelayanan pajak daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Bapenda Banten telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan keuangan dalam beberapa prinsip tata Kelola yang baik pada sektor publik. Komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dalam meningkatkan kepercayaan para warga/Masyarakat terhadap pemerintah daerah, akan tetapi berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah diteliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Bapenda Banten dalam mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor public telah menunjukkan hasil komitmen yang sangat kuat.

Hal ini terlihat dari ketersediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, laporan dalam pertanggungjawaban yang mendetail, pencapaian sasaran kinerja yang baik, serta adanya program khusus yang fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi prinsip ini tidak berlaku hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, namun berkontribusi pada pencegahan korupsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta penguatan praktik demokrasi.

Meskipun demikian, upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi perhatian utama. Terdapat rekomendasi lain yang dapat dilakukan yaitu penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, Kantor Bapenda Banten

dapat terus menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam menciptakan tata kelola yang sudah optimal.

REFERENSI

- Adyaksana, R. I., & Alqurani, L. (2020). Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan transparansi dan akuntabilitas. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.74>
- Arini Kurniawati, & Dadang Sadeli. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 2(2), 18–24. <https://doi.org/10.23969/brainy.v2i2.41>
- Dedy Afrianto, Sunardi, N. S. (2024). Pengaruh Perencanaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1115–1140.
- Dinata, H. S., Putri, A. M., & Aristi, M. D. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMAN 12 Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–57. <http://dx.doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852>
- Dja'wa, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Daerah Pemekaran. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(01), 641–671. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v2i01.497>
- Fierda Shafratunnisa. (2015). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di Sd Islam Binakheir. In Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29717>
- Harfianah, S., & Faisal, F. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2534–2549. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p01>
- Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, I. S. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.4135/9781446216415.n11>
- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 6(2), 236–254.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Kinanti Putri Bestari, A. A. T. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

- Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1211>
- Lismaini Agustin, A. A. T. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 216–236. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1204>
- Nur Azizah, Sahlan Hasbi, F. Y. (2021). Pengaruh Brand Awareness, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zis Di Kitabisa.Com. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 111–125. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.241>
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Rahmadani, F., Maison, W., & Defitri, S. Y. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10, 163–173.
- Reki, Z. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Rusrina, R. (2021). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. *PINISI Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 1–9.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Yunnita, Christina Garung, L. L. G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>